

Penguatan Hubungan Kelembagaan Desa di Kabupaten Garut (Studi Tentang Manajemen Bencana)

RD. Ahmad Buchari

Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Padjadjaran

e-mail : ahmad_buchari@yahoo.com

Abstrak

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, dan umumnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, hal yang paling penting adalah manajemen bencana untuk meminimalkan dampak berbahaya dari bencana. Di daerah, hubungan antar lembaga desa sangat penting dalam mitigasi bencana. Ini karena administrasi desa (pemerintah) yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dan yang terakhir terkena dampak langsung bencana di daerah. Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah, bagaimana penguatan hubungan kelembagaan desa-desa di Kabupaten Garut? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pejabat desa dan relawan Destana. Adapun pengamatan dilakukan di lapangan pada kegiatan yang dilakukan terkait dengan langkah-langkah mitigasi bencana di empat desa yang merupakan objek penelitian, yaitu, Pasawahan, Rancabango, Mekarjaya, dan Karyamekar. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa lembaga-lembaga di empat desa telah cukup baik tetapi masih perlu diperkuat dalam konteks manajemen bencana. Keempat desa rentan terhadap bencana dan memiliki instrumen Destana sebagai penjaga manajemen bencana di tingkat desa. Mengingat hasil penelitian, disarankan agar pejabat desa meningkatkan manajemen bencana mereka, antara lain dengan melakukan sosialisasi tentang risiko bencana, cara-cara mengurangi kejadian bencana, dan cara meminimalkan kerugian jika bencana benar-benar terjadi.

Kata Kunci:memperkuat hubungan kelembagaan; mitigasi bencana; instrumen Destana; desa-desa di Kabupaten Garut

Strengthening The Institutional Relationships Among Villages In Garut Regency (Study of Disaster Management)

Abstract

Disaster may occur anytime and anywhere, and is generally unpredictable. Therefore, the most important to do is applying disaster management to minimize any harmful impacts of disaster. In this case, the relationship among village institutions is of high importance in disaster mitigation. This is because of the direct relationship owned by the village administration (government) to the community, the one that is directly impacted by disaster. Meanwhile, the problem studied in the present research was, how is the strengthening of institutional relationships of the villages in Garut Regency? The research method used was a qualitative method. The data collection techniques used were interview and observation. Interview was conducted with the village officials and Destana volunteers. Observation was performed in the field at the time the disaster mitigation did, in four villages which were the research objects, namely, Pasawahan, Rancabango, Mekarjaya, and Karyamekar. The research result revealed that the institutions in the four villages have been good enough but still need to be strengthened in the context of disaster management. The four villages were vulnerable to disasters and have had Destana instrument as a guard of disaster management at the village level. The study suggested that the village officials need to improve their capacity in disaster management, conducting socialization in regard with the disaster risks, lessening disaster occurrences, and minimizing losses of a disaster.

Keywords: strengthening of institutional relationships; disaster mitigation; Destana instrument; villages in Garut Regency

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

A. PENDAHULUAN

Reformasi menjadi tuntutan bagi Bangsa Indonesia yang paling besar. Tuntutan otonomi daerah terus menguat, dari daerah-daerah bermunculan beragam keinginan sektoral untuk membangun daerahnya tanpa memperlihatkan kebutuhan dasar yang memang diperlukan dari daerahnya sendiri. Keberadaan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam pelaksanaannya justru menimbulkan kebingungan di masyarakat, dan tidak serta merta mampu menangkap aspirasi masyarakat terutama di desa. Hal ini terutama kelembagaan desa yang merupakan ujung tombak pembangunan menjadi sesuatu yang diperebutkan oleh berbagai macam kepentingan. Kajian ini merupakan kajian yang penting dalam ilmu sosial, khususnya dalam Administrasi Publik karena terdapat perubahan paradigma dari *government* kepada *governance*.

Untuk meminimalisasi konflik di daerah, terutama di desa diperlukan adanya perencanaan SDM dan penguatan kelembagaan desa yang matang dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam penanganan bencana. Penanganan Bencana diatur menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksanaan masalah terkait, yaitu Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Dalam proses mengelola bencana tidak bisa dilakukan secara mendadak, diperlukan perencanaan yang matang agar dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, maka tahapan kebencanaan ada tiga

tahap yaitu Tahap Pra Bencana, Tahap Tanggap Darurat dan Tahap Pasca Bencana.

Salah satu wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana diantara 18 kabupaten serta 9 kota di Jawa Barat adalah Kabupaten Garut. Merujuk pada data Indeks Rawan Bencana Kabupaten/Kota tahun 2011, Kabupaten Garut menjadi urutan pertama dalam skala nasional dengan kategori kelas rawan yang tinggi dan mendapatkan skor 139 (IRBI, BNPB, 2011.) Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Barus dkk. (2012), ditemukan bahwa Kabupaten Garut memiliki kawasan rawan bencana yang sangat luas, seperti kawasan rawan letusan gunung berapi, tsunami, gempa bumi maupun longsor dan banjir.

Data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut menginformasikan bahwa hingga April 2015 tercatat 42 kejadian bencana, meliputi bencana tanah longsor terjadi 29 kejadian, angin puting beliung 8 kejadian dan banjir 5 kejadian. Berdasarkan data dari BNPB (2016) pada bulan September di Kabupaten Garut disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dalam surasi waktu 4 jam pada tanggal 20 September 2016 di wilayah Garut telah menyebabkan meluapnya Sungai Cimanuk dan Sungai Cikamiri hingga menyebabkan banjir bandang yang melanda 6 kecamatan.

Berdasarkan kondisi wilayah di Kabupaten Garut yang rawan bencana, maka BNPB mengeluarkan strategi melalui pengembangan Desa/ Kelurahan tangguh terhadap bencana dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK). Pelaksanaan PRBBK dengan mengembangkan program Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) yang tercantum dalam Perka BNPB No 1 Tahun 2012. Sebagai kabupaten yang memiliki skor tertinggi rawan bencana, maka BPBD Kabupaten Garut mencanangkan enam Desa untuk dibentuk menjadi Desa tangguh bencana. Pada setiap Destana, BPBD melatih 30 tokoh perwakilan masyarakat untuk dididik kepedulian dan keingintahuan mereka mengenai potensi bencana yang ada di lingkungan sekitarnya yang mengancam. Perwakilan masyarakat tersebut dilatih untuk melakukan pemetaan partisipatif dan penyusunan rencana penanggulangan bencana.

Diharapkan dengan adanya program

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

tersebut, setiap Desa/ Kelurahan terpilih untuk memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri dan kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana maupun memulihkan diri dari dampak bencana tersebut. Guna mewujudkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana (Destana), semua stakeholder baik itu masyarakat maupun pemerintah Desa/Kelurahan harus berpartisipasi aktif dan juga harus didukung dengan infrastruktur, ekonomi, politik, dan sosial-budaya (bersifat multi-disiplin dan multi-sektoral). Selain itu masyarakat akan memiliki Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat, dan Rencana Kontinjensi serta jalur evakuasi berdasarkan pengetahuan dan kemampuan mereka terhadap lingkungannya. Mengingat Kabupaten Garut merupakan daerah rawan bencana, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bekerjasama untuk mengurangi jumlah korban apabila terjadi kembali bencana alam.

Berdasarkan fenomena sebagaimana diuraikan dalam latar belakang penelitian, maka riset ini meneliti mengenai penguatan kelembagaan desa dalam penanganan bencana di Kabupaten Garut. Masalah pokok yang menjadi landasan riset ini adalah: Penguatan Hubungan Kelembagaan Desa di Kabupaten Garut (Studi tentang Manajemen Bencana) belum berjalan dengan baik.

B. PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan hasil penelitian terhadap empat Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Garut, yaitu Desa Pasawahan, Desa Rancabango, Desa Mekarjaya, dan Desa Karyamekar. Adapun hasil penelitian terbagi menjadi lima aspek, yaitu: 1) Legislasi; 2) Perencanaan; 3) Kelembagaan; 4) Pengembangan Kapasitas; dan 5) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Legislasi

1. Desa Pasawahan:

Belum ada peraturan desa yang mengatur tentang pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa. legislasi yang mengatur mengenai Destana hanya berpegang pada Perka BNPB Nomor 1 tahun 2012 dan Undang-Undang Desa.

2. Desa Rancabango:

Peraturan yang mengatur dibukukan

berbentuk *hardcopy* dan *softcopy* itu disimpan oleh pihak desa, namun file *softcopy* disimpan pada komputer di bagian pemerintahan desa, akan tetapi komputer tersebut rusak dan tidak dapat diakses. Dalam mekanisme penyusunan peraturan desa tersebut, pertama dibentuk tim dan menentukan apa saja kegiatannya, apa yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana atau pengurangan risiko bencana, serta apa saja tugas dan fungsi masing-masing yang ada di dalam tim tersebut, kemudian berlanjut pada tahap pembuatan surat keputusan berdasarkan forum dan dilegalkan oleh kepala desa maupun pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan desa tentang kebencanaan, hal ini dimaksudkan guna menampung aspirasi dari semua kalangan, mulai dari LPMD, BPD, dan perangkat desa lainnya yang diketuai oleh Sekretaris Desa. Selain itu, masyarakat pun turut dilibatkan untuk menampung aspirasi di luar lembaga agar mampu menampung aspirasi dari tiap-tiap wilayah, adapun masyarakat yang banyak memberikan aspirasi adalah kaum perempuan.

3. Desa Karyamekar:

Desa Karyamekar belum memiliki peraturan desa mengenai kebencanaan, hanya baru berupa rancangan. Prose legalisasinya saat ini hanya berupa Surat Keputusannya. Pembahasan perumusan perdesnya akan dilakukan ketika kepala desa baru sudah terpilih. Untuk mekanisme penyusunannya dengan cara bermusyawarah antara tokoh masyarakat dan desa. Pihak yang terlibat dalam penyusunan perdes yaitu Forum, kepala desa, Badan permusyawaratan desa. Untuk masyarakat dilibatkan ketika pelibatan penyerapan aspirasi kemudian nantinya di musyawarahkan dengan BPD dan di tuangkan dalam peraturan desa. Adapun SOP legal menghadapi bencana belum ada.

4. Desa Mekarjaya:

Dokumen legal mengenai pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana di tingkat desa masih berbentuk draft dan Surat Keputusan. Dalam penyusunan surat keputusan tersebut terdapat beberapa pihak yang terlibat sekaligus akan menjadi relawan Destana, yaitu: 1) Aparat Desa; 2) RT; 3) RW; 4) Tokoh Masyarakat 5) Masyarakat. Di Desa Mekarjaya belum terdapat *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk menghadapi bencana, karena untuk

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

membuat SOP diperlukan konsolidasi dengan berbagai elemen, selain itu belum terbentuknya SOP juga disebabkan oleh belum diresmikannya Perdes yang mengatur mengenai pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana.

Hal yang memicu terjadinya bencana di akibatkan karena belum adanya peraturan yang jelas mengenai pengelolaan lahan milik pemerintah menyebabkan lahan tersebut mengalami alih fungsi lahan. Lahan yang dulunya di kelola oleh PD. AP dan ditanami teh kini beralih fungsi menjadi lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat. Dalam pengelolaannya masyarakat belum memiliki izin. Pada saat ditanami tanaman teh, banjir tidak pernah terjadi di Desa Mekarjaya, namun ketika PD. AP mulai mengalami kemunduran lahan tidak ditanami dan pada akhirnya masyarakat menanam sayuran di lahan tersebut. Sejak lahan tersebut ditanami sayuran banjir mulai terjadi di Desa Mekarjaya karena sifat dari tanaman sayuran yang tidak dapat menahan tanah dan kondisi tanah yang ditanami sayuran biasanya gembur sehingga ketika terjadi hujan material dari tanah terbawa ke sungai oleh air hujan dan pada akhirnya sungai pun mengalami pendangkalan.

Perencanaan

1. Desa Pasawahan:

Dokumen panduan rencana penanggulangan bencana di tingkat desa sudah ada dan dibuat sesuai kebutuhan tiap daerah dan berdasarkan anggaran dasar agar menjadi kendali untuk menyatukan visi di desa. Dokumen rencana penanggulangan bencana di tingkat desa tidak didasarkan pada format baku BPBD. Pada program perencanaan ini informan memberitahu kontijensi untuk menghadapi bencana tingkat desa berupa pendataan terhadap barang berharga yang dimiliki masyarakat untuk mengetahui berapa kerugian yang diakibatkan apabila terjadi bencana yang di timbulkan. Kemudian pada rencana aksi pengurangan resiko bencana ini pun sudah direncanakan terlebih dahulu yang tercantum dalam anggaran dasar yang dalam penyusunannya dibuat oleh anggota dan berfungsi untuk menaungi semua masyarakat di desa ini.

2. Desa Rancabango:

Dokumen rencana penanggulangan bencana untuk potensi bencana gunung

melutus, banjir, longsor sudah ada dalam bentuk buku saku. Buku saku tersebut berisi rencana-rencana berdasarkan hasil kajian dari potensi bencana yang ada di daerah wilayah Desa Rancabango, kajian resiko bencana serta dibuatkan untuk kebutuhan bencana di daerah tergantung potensi bencana seperti terjadi bencananya apa dan penanggulangannya pun seperti apa, jelas berbeda dalam setiap bencana penanggulangannya pun.

Dalam penanggulangan bencana ada rencana kontijensi untuk menghadapi bencana di tingkat desa informanpun menjelaskan untuk hal tersebut yang lebih banyak mengetahui rencana kontijensi hanya forum yang mengikuti pelatihan yang di selenggarakan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta dokumen mengenai rencana aksi pengurangan resiko bencana ada di bagian pemerintahan desa dalam penyusunan pun yang terlibat untuk hal tersebut yang hanya terlibat adalah Kepala Desa dan Aparat Desa seperti LPMD, MUI, dan lembaga-lembaga yang ada di desa akan tetapi untuk relawan/anggota BPBD tidak dilibatkan hanya diberi arahan apalagi masyarakat tidak tahu apa-apa mengenai dalam penyusunan dan tidak dilibatkan dan rencana tersebut telah di integrasikan dengan dokumen pembangunan di tingkat desa seperti misalnya musrenbang informan pun menjawab dokumen rencana penanggulangan sebaiknya ditanyakan kepada forum penanggulangan resiko bencana seperti evaluasi Destana dan sebenarnya untuk kegiatan yang ada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah baru aktif dan evaluasinya juga tapi untuk pertemuan hanya sebulan sekali dan jarang ada evaluasi, jika ada evaluasi ketika terkait indikasi bencana kemudian baru untuk dibahas.

3. Desa Mekarjaya:

Rencana aksi untuk mengurangi resiko bencana tidak tertuang dalam dokumen, pengurangan resiko bencana akan dilakukan dengan penanaman pohon kopi di lahan yang belum jelas status pengelolaannya. Pemerintah desa mulai mengajukan kepada pemerintah terutama perhutani untuk memberikan bantuan berupa bibit kopi. Apabila ditanami pohon kopi masyarakat tidak akan menebang pohonnya karena pohon kopi selalu menghasilkan buah, dan meskipun masyarakat tidak menanam sayuran masyarakat juga mendapatkan penghasilan dari pohon tersebut berbeda

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

dengan pohon kayu meskipun pohonnya tidak terlalu besar biasanya sudah ditebang oleh masyarakat. Dengan ditanami pohon kopi akarnya dapat menahan tanah ketika terjadi hujan dan pendangkalan sungai pun sedikitnya bisa teratasi.

Di Desa Mekarjaya belum terdapat dokumen mengenai rencana penanggulangan bencana di tingkat desa, tapi pengurangan resiko bencana dilakukan dengan cara dibentuknya destana dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai jangan membuang sampah sembarangan, pemeliharaan saluran air dan penanaman pohon. Penyuluhan tersebut dilakukan karena pemerintah desa sadar bahwa meskipun ada bantuan pembangunan tanggul dari pemerintah pusat itu tidak dapat menyelesaikan permasalahan banjir sepenuhnya, karena apabila kebiasaan masyarakat yang membuang sampah anorganik kesungai dan alih fungsi lahan tetap dibiarkan maka banjir akan terus mengahantui masyarakat Desa Mekarjaya. Penanaman pohon sudah berjalan namun belum menyeluruh, karena ketersediaan bibit tanaman yang terbatas, padahal masyarakat sudah mulai menyadari bahwa penanam tanaman kayu itu penting. Jadi perencanaan untuk mengurangi resiko bencana di Desa Mekarjaya lebih kepada penanaman lahan di hutan yang mulai gundul dengan penyediaan bibit-bibit tanaman bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti Perbankin, Pertamina dan PLN serta LSM Badan Lestari jaya.

4. Desa Karyamekar:

Saat ini Desa Karyamekar belum mandiri dan masih melakukan aksi atas intruksi dari pelatihan BPBD. Untuk rencana aksi kedepannya berencana penanaman pohon, tanaman masyarakat untuk di tanam di depan rumah masing-masing seperti menanam cabai. Hasil dari penanaman pohon tersebut diperuntukkan bagi masyarakat. Aksi ini dilakukan bersama anggota forum. Harapan ke depannya hasil tanam tersebut dapat menjadi pemasukan bagi forum, atau dibeli oleh warga dengan harga sekian.

Kelembagaan

1. Desa Pasawahan

Dalam pembentukan Kelembagaan

Penanggulangan Bencana di tingkat desa Pasawahan, forum ini sudah di bentuk pada tahun 2015 akhir dan forum ini sudah ada legalitasnya untuk berdiri, dalam pembentukannya forum ini mengadakan pelatihan yang diikuti oleh 30 orang pada tahun 2014 untuk penguatan FRB yang di fungsikan untuk persiapan bencana di desa pasawahan yaitu terkait bencana gunung merapi, kebakaran hutan, banjir, longsor dan epidemik penyakit. Informan memberi tahu pula unsur yang terlibat dalam forum penanggulangan bencana ini.

Terdapat tiga unsur yang terlibat diantaranya masyarakat, pemerintah dan pengusaha dari ketiga unsur tersebut terdapat peran dan fungsinya masing-masing. Unsur yang pertama yaitu unsur pemerintah misalnya dari pihak RT, RW yang memberitahukan bagaimana cara mempersiapkan diri ketika terjadi bencana, dari pihak DKM dan MUI yang memberikan informasi bagaimana bencana itu di dalam acara agamaan (pengajian), dari pihak keamanan desa seperti kamtibmas, babinsa dan hansip bertugas untuk mengamankan keadaan ketika terjadi evakuasi kebencanaan. Unsur yang kedua yaitu dari unsur masyarakat anggota yang berjumlah 30 orang itu bertugas untuk mendata berapa orang yang rentan apabila terjadi bencana seperti halnya ibu menyusui, anak bayi, balita, lansia dan kemudian orang-orang disabilitas selain mendata orang-orang yang rentan terhadap bencana tersebut unsur masyarakat yang beranggotakan 30 ini bertugas juga mendata berapa fasilitas untuk mendukung evakuasi ketika terjadi bencana anggota masyarakat pun berhasil mendata fasilitas yang berada di desa pasawahan ini seperti 128 unit mobil dan motor 714 unit. Kemudian unsur yang ketiga yaitu dari unsur pengusaha yang berperan untuk memberikan materi berupa kebutuhan pangan dan sandang atau bisa juga berbentuk uang ketika terjadi bencana.

Forum tersebut sementara ini dibawah tanggung jawab BPBD kabupaten dan desa. Ketiga unsur yang meliputi pemerintah, masyarakat, dan pengusaha disini sudah mempunyai visi dan misi yang sama dalam artian ketiga unsur tersebut sudah kompak bersatu bersama membangun desa ketika terjadinya bencana. Selain dari ketiga unsur tersebut ada instansi-instansi dan LSM yang

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

terlibat seperti dari BPBD, Badan Pembangunan Nasional, Ketahanan Nasional, Kepolisian, TNI dan LSM GMPI. Informan memaparkan bahwa Dinas Sosial memberikan koordinasi mengenai perencanaan musibah itu sendiri sedangkan dari pihak LSM tersebut hanya perwakilan pelatihan saja dan juga turun langsung ke lapangan ketika terjadi banjir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah.

2. Desa Rancabango

Banyak orang yang terlibat dalam pembentukan FRB Desa Rancabango, dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang membuat surat keputusan dalam Forum Penanggulangan Bencana sebagai pemberi legalitas, kemudian diusung oleh Kepala Desa dan setelah pembuatan surat keputusan pun untuk anggota. Forum Penanggulangan Bencana (FRB) diberikan pelatihan untuk anggotanya yang kurang lebih ada 60 orang yang terlibat dalam keanggotaan dari masyarakat yang didalamnya terdapat kalangan perempuan, PKK, RT/RW, tokoh masyarakat dan lainnya.

Unsur yang terlibat yaitu semua unsur di dalam desa yang seperti PKK, LPM, Kader – kader posyandu dan lainnya itu masuk kedalam keanggotaan BPBD yang bertanggung jawab kepada kepala desa untuk penanggulangan bencana yang ada di wilayah Desa Rancabango. Hubungan dengan instansi lainnya seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (DINSOS), Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hubungan dengan instansi tersebut yaitu berhubungan saling berkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ketika ada bencana besar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memberikan bantuan teknis dan evakuasi apabila bencana tersebut sudah tidak bisa dihandle oleh Destana tersebut, Dinas Sosial (DINSOS) membantu dalam bidang kelogistikan dan psikologi, kalau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut tergantung bagaimana kondisi dilapangan. Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dari koramil dan polsek, Puskemas atau rumah sakit semuanya berkoordinasi melakukan tugas sesuai dengan instansinya masing-masing. Tim

relawan untuk penanggulangan bencana atau Destana di tingkat RT/RW Forum ini sudah mencakup didalamnya ada yang perwakilan rt dan rw dan dasawisma Jadi satu desa ini hanya ada keterwakilan untuk forum isinya relawan yang kurang lebih jumlahnya ada 60 orang dan instansi pemerintahan yang berkerja sama dalam membangun Destana adalah pihak dari Koramil, Polsek dari kabupaten garut yang berada dengan dekat desa mungkin bila ada bencana untuk kesehatan dari pihak rumah sakit dan puskesmas, bantuan makanan dari departemen sosial. Untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak ada keterlibatan untuk membangun Destana mereka hanya membantu dilapangan ketika langsung pada saat tanggap darurat dan tidak menjadi bagian dari destana tersebut.

3. Desa Mekarjaya:

Beberapa anggota Destana di Desa Mekarjaya selalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BPBD. Di Desa Mekarjaya relawan Destana berjumlah 30 orang. Materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut mengenai pengetahuan dasar kebencanaan dimulai dari penyebab bencana, cara mengatasi orang yang terkena dampak bencana seperti apa dan dilatih juga di lapangan. Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan maka ada beberapa relawan destana disini diikutsertakan menjadi relawan pada saat banjir bandang di Garut Kota. Dalam pelatihan yang dilibatkan hanyalah relawan destana, masyarakat umum tidak diberikan pelatihan.

Selama ini kegiatan yang dilakukan oleh destana hanya sebatas kegiatan urgent pada saat terjadi bencana, kalau kegiatana preventif belum dilakukan. Maka dari pihak desa terkadang memberikan pendekatan kepada masyarakat mengenai kebencanaan atau tindakan preventif seperti penanaman pohon dan tidak membuang sampah ke sungai pada saat dilakukan pengajian bulanan di setiap RW. Pada saat pengajian merupakan saat yang paling efektif untuk melakukan pendekatan pada masyarakat. dengan adanya pengajian bulanan ini kelebihannya yaitu keagamaan dan juga program-program desa lebih bisa tersampaikan dengan baik. Selain itu juga informasi yang disampaikan diterima secara merata oleh masyarakat. Sebenarnya masyarakat yang sudah memiliki lahan sendiri sudah mulai sadar pentingnya menanam pohon, terutama ketika

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

diberikan bantuan tanaman kayu putih sebagian masyarakat mau menanam di tanah-tanah milik mereka. Lain halnya dengan masyarakat yang menanam di lahan pemerintah yang lebih memilih menanam tanaman sayuran.

Forum Relawan Bencana beranggotakan perwakilan dari setiap RW terutama RW yang merupakan daerah rawan banjir. Dari setiap RW itu ada 4 hingga 5 perwakilan yang mengikuti forum. Dalam penanggulangan bencana forum ini berfungsi untuk memberikan pertolongan pertama bagi korban yang mengalami luka-luka, mengarahkan masyarakat ke zona aman, melakukan pendataan untuk kemudian dilaporkan kepada pemerintah desa dan BPBD. Dalam semua kegiatan yang dilakukan forum ini bertanggungjawab kepada desa. Ketika terjadi bencana forum berkoordinasi dengan desa dan BPBD. Dalam pembentukannya Destana dibentuk oleh Desa dan BPBD. Sementara penuturan dari salah satu anggota BPBD untuk kerjasama antar pelaku dan wilayah di Desa Mekarjaya baru mau ada rencana untuk bekerjasama dengan Desa Cibodas untuk penanaman pohon kopi.

4. Desa Karyamekar:

Kelembagaan Destana di Desa Karyamekar untuk forum PRB sudah terbentuk berjumlah 60 orang di bentuk pada tahun 2016. Relawan yang ikut serta sama seperti di desa-desa lainnya keterwakilan dari aparat desa, RT/RW, kader PKK, tokoh masyarakat dan masyarakat desa yang ingin berpartisipasi. Untuk kegiatan pelatihannya pun di berikan kepada anggota forum Destana yang menjadi relawan, untuk penyebaran informasinya sama seperti desa-desa lain dengan dilakukan pendekatan perorangan memberikan pengetahuan terkait kebencanaan serta saat ada kumpul-kumpul atau pengajian diselipkan pengetahuan mengenai kebencanaan. Untuk kerjasama antar pelaku dan wilayah di desa Karyamekar masih belum ada.

Pengembangan Kapasitas

1. Desa Pasawahan:

Dalam program pengembangan kapasitas dari forum ini relawan destana mendapatkan pelatihan tentang kebencanaan yang diberikan oleh pihak BPBD Kabupaten Garut. Pelatihannya dari mulai sosialisasi, identifikasi bencana, kontijensi, jalur evakuasi melalui peta-peta

kebencanaan selain pelatihan para relawan pun mempunyai buku rencana penanggulangan. Pelatihan yang di berikan hanya kepada relawan Destana, untuk pemerintah desanya pun yang mendapat pelatihan yaitu pemerintah desa yang termasuk kedalam relawan destana. Pelatihan kepada masyarakat desa masih belum ada hanya sebatas memberikan informasi terkait kebencanaan ketika ada kumpul-kumpul atau pada saat pengajian. Untuk pelibatan partisipasi masyarakat desa hanya dilakukan saat terjadi bencana masyarakat desa ikut membantu Sedangkan pelibatan kaum perempuan di desa ini sudah ada yang termasuk ke dalam relawan destana.

2. Desa Rancabango:

Masyarakat tidak mendapatkan langsung pelatihan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mendapatkan langsung pelatihan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu anggota Destana yang berjumlah kurang lebih 60 orang. Dalam mendapatkan pendidikan tentang kebencanaan pun sama dan hasil dari pendidikan tersebut diberitahukan kepada RT/RW dan waktu itu di Sekolah Dasar ada pendidikan untuk anak-anak ketika ada bencana gempa bumi harus bagaimana cara menyelamatkan diri ketika berada didalam ruangan dan itu diberitahukan kepada guru-guru yang ada di sekolah tersebut terkait informasi yang didapatkan tentang kebencanaan untuk masyarakat sendiri tidak terlibat dalam informasi tersebut hanya dalam Destana yang berjumlah 60 orang itu memberikan informasi tentang kebencanaan ada BMKG yang berada di Desa Mekarjaya Kampung Cukang Kawung dan tahapnya di beritahukan kepada masyarakat. Untuk mengenai jalur evakuasi masyarakat sudah tau ketika ada bencana harus kemana apabila tidak bisa ditangani oleh Destana atau Masyarakat tersendiri. Untuk pelibatan pasrtisipasi masyarakat desa ikut terlibat ketika terjadi bencana sedangkan untuk pelatihan tidak dilibatkan. Ketika terjadi bencana sebagian masyarakat saling membantu relawan Destana. Dan untuk keterlibatan kaum perempuan di Desa Rancabango sudah banyak.

3. Desa Mekarjaya:

Beberapa relawan destana di Desa Mekarjaya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BPBD. Dalam pelatihan tersebut masyarakat umum belum dilibatkan.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Masyarakat diberikan informasi-informasi pada saat pengajian bulanan dan pada saat berbincang dengan salah satu relawan destana yang mengalami pelatihan. Untuk keterlibatan perempuan di Desa ini sudah ada hanya jumlahnya tidak sebanyak di Desa Rancabango.

4. Desa Karyamekar:

Pengembangan Kapasitas Destana di Desa Karyamekar sama halnya seperti di desa-desa lain pelatihan yang diberikan hanya untuk relawan Destana, pelatihan untuk pemerintah desa hanya untuk pemerintah desa yang ikut bergabung dengan relawan yang berjumlah 60 orang. Pelatihan untuk masyarakat desa belum ada, masyarakat desa. Pelibatan partisipasi masyarakat terjadi saat terjadi bencana. Dan untuk pelibatan kaum perempuan di relawan Destana sudah ada.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, maka Penulis berkesimpulan bahwa Kelembagaan Desa di Kabupaten Garut, meliputi Desa Rancabango, Pasawahan, Mekarjaya, dan Karyamekar perlu diperkuat dalam konteks manajemen bencana. Keempat desa ini merupakan wilayah yang terdampak bencana dan memiliki instrumen Destana sebagai garda penanganan bencana di tingkat desa. Hal ini diperlukan mengingat Kabupaten Garut merupakan daerah rawan bencana, perlu diidentifikasi karakteristik khas mengenai daerah rawan bencana, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya preventif ataupun tindakan represif yang tepat ketika terjadi bencana.

Beberapa temuan di lapangan menunjukkan bahwa perlu kiranya para pihak terkait untuk lebih menaruh rasa kepedulian terhadap pengembangan Destana ini, dikarenakan tatkala terjadi bencana, maka pihak yang lebih dulu berperan ialah warga masyarakat di sekitar wilayah yang terkena bencana. Asumsi ini kemudian yang mendasari berdirinya Destana di beberapa desa yang berpotensi rawan bencana.

REFERENSI

- Adi, Isbandi Rukminto. 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. FE. UI. Jakarta
- Alzwar, Akbar, dan Bachri. 1992. *Peta Geologi Lembar Garut dan Pamengpeuk skala 1:100.000*. Bandung: Puslitbang Geologi
- Blind, Peri K. 2007. *Building Trust in Government In The Twenty-First Century: Review of Literature and Emerging Issues. Paper Presenter in 7th GLOBAL Forum on Reinventing Government Building Trust in Government 26-29 June 2007*. Vienna: Austria
- Creswell, John. W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. Sage. California
- Direktorat Jenderal Bantuan dan Jamnan Sosial-Direktorat Bantuan soial Koraban Bencana Alam. 2003. *Pedoman Teknis Standarnisasi Bantuan Sosial Korban Benacana Alam*. Departemen Sosial RI. Jakarta
- . 2005 *Pedoman Umum Bantuan Soasial Korban Bencana Alam*. Departemen Sosial RI. Jakarta
- 2005. *Pedoman Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas*. Departemen Sosial RI. Jakarta
- Howlett, Michael dan Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford University Press. New York
- Kurniawan, Lilik dkk. 2011. *Indeks Rawan Bencana Indonesia*. Jakarta: BNPB
- Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru)*. UI Press. Jakarta
- Ratman, N. dan Gafoer, S. 1998. *Peta Geologi Lembar Jawa Bagian Barat skala 1:500.000*. Bandung: Puslitbang Geologi
- Suprpto, dkk. 2011. *Atlas Kebencanaan Indonesia 2011*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana & Badan Informasi Geospasial